

PAPUA DALAM MEDIA: ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA BARAT

PAPUA IN MEDIA: FRAMING ANALYSIS ABOUT SPECIAL AUTONOMY AT WEST PAPUA

Efa Rubawati

Universitas Airlangga, Surabaya – Indonesia
rubawatief@gmail.com

Abstract

The construction of the reality of Papuan society in the media is considered to be the actual reality. The media does not fully present what is relevant to the reality. Framing affects news reporting on similar problems, such as special autonomy in West Papua. This paper describes the construction of reality conducted by the media, using Robert N. Entman's framing analysis of Radar Sorong and Antara West Papua. The results show Radar Sorong emphasized that special autonomy in West Papua needs to be evaluated, while Antara West Papua tends to support the application of special autonomy, albeit with an emphasis on new schemes. The construction of the Papuan reality in the media towards the reporting of special autonomy occurs because of economic and political interests, as well as media hegemony and the regime of representation and the influence of structuration in media institution.

Keywords: reality construction, framing, media, Papua.

Abstrak

Konstruksi realitas masyarakat Papua dalam media menghadirkan sebuah realitas yang dianggap sebagai realitas sebenarnya. Realitas media tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sebenarnya. *Framing* mempengaruhi pemberitaan permasalahan yang sama, seperti otonomi khusus di Papua Barat. Tulisan ini memaparkan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media, menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman terhadap *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat*. Hasilnya menunjukkan *Radar Sorong* menekankan bahwa otonomi khusus di Papua Barat perlu dievaluasi, sedangkan *Antara Papua Barat* cenderung mendukung penerapan otonomi khusus, meskipun dengan penekanan pada skema baru. Konstruksi realitas Papua dalam media terhadap pemberitaan otonomi khusus terjadi karena faktor kepentingan ekonomi dan politik, hegemoni media dan rezim representasi, serta pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.

Kata kunci: konstruksi realitas, *framing*, media, Papua.

Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penduduk miskin di Indonesia per september 2017, menunjukkan persentase pulau Papua mendominasi, yakni Papua 27,76% dan Papua Barat 23,12%. Urutan selanjutnya NTT 21,38%, Maluku 18,29%, Gorontalo 17,14%, Bengkulu 15,59%, dan Aceh 15,92% (Statistik, 2018). Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Papua menempati peringkat pertama jumlah penduduk miskin di Indonesia yang disusul peringkat kedua masih dari wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua Barat. Kondisi ini sangat ironis, karena Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Ini jelas mengindikasikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam

di Papua belum berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Eksplorasi dan eksploitasi produksi sumber daya alam yang sangat tinggi dilakukan oleh para pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri, dan juga oleh pemegang otoritas di lembaga-lembaga publik, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang layak (Papua, 2006). Menurut Paul, salah satu aktivis Papua (dalam (Andrianto, 2001), adanya eksploitasi kekayaan alam yang disertai minimnya pembangunan dan infrastruktur penunjang, serta buruknya pelayanan kesehatan hingga tingginya angka kemiskinan merupakan runtutan panjang dari polemik Papua, yang menyebabkan rakyat Papua menuntut kemerdekaan, karena selama ini hidup dalam eksploitasi dan penindasan. Diskursus yang berkembang adalah eksploitasi

alam tanpa mempertimbangkan asas keadilan, kekayaan alam diambil tanpa permisi dan tanpa adanya perundingan tentang upaya memperbaiki kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk meredam keinginan dan tuntutan masyarakat Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suryawan (2011), untuk meredam tuntutan kemerdekaan pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandatangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarnoputri, dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001. Namun sayangnya, sejak diberlakukan dana Otsus di Papua dan Papua Barat, pengalokasian dana Otsus ternyata kurang tepat sasaran, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Malak (2012), pembangunan Papua adalah pembangunan yang sesuai dengan karakter, nilai-nilai, dan jati diri orang Papua, sehingga sejumlah kemajuan yang dicapai adalah sesuatu yang sesuai atau selaras dengan keinginan orang Papua. Sebaliknya sejumlah persoalan atau bahkan kegagalan yang menghadang proses pembangunan yang tidak membuahkan hasil terjadi karena tidak sejalan dengan karakter, nilai-nilai, dan jati diri orang Papua, tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang Papua.

Banyak studi yang telah membahas mengenai otonomi khusus di Papua. Sebut saja Suryawan (2011), dalam tulisan jurnal "Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" menunjukkan bahwa otonomi khusus dan pemekaran di Papua berimplikasi pada semakin jauhnya cita-cita untuk pemberdayaan orang Papua. Hal ini disebabkan elit lokal dalam lingkaran kekuasaan memanfaatkan otonomi khusus untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga terjadilah yang disebut "Papua makan Papua". Sementara itu, Rochendi (Rochendi & Saleh, 2017) dalam "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat" menunjukkan implementasi otonomi khusus di Papua Barat ternyata berbeda dengan yang tergambarkan pada undang-undang. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pendampingan, pembinaan, dan pengawasan pemerintah pusat belum terlihat. Meskipun demikian, dari

tulisan-tulisan tersebut, belum ada tulisan yang membahas mengenai peran serta media terhadap otonomi khusus di Papua. Padahal, media memiliki peranan yang sangat penting, karena media mampu menciptakan realitas di tengah masyarakat. Dengan menggunakan *framing* media untuk menentukan informasi yang diperoleh masyarakat, dalam hal ini adalah pemberitaan mengenai otonomi khusus Papua.

Berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya yang menitikberatkan pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dampak dari otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, maka tulisan ini melihat dari sisi peran media. Media yang dianalisis adalah media lokal, yakni *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat*. Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta media lokal dalam membingkai pemberitaan mengenai otonomi khusus di Papua serta bagaimana konstruksi yang dilakukan hingga berita sampai ke masyarakat. Masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah "Bagaimana Papua dalam media?". Kemudian pertanyaan tersebut penulis jabarkan dalam tiga rumusan masalah; Bagaimana konstruksi realitas media terhadap Papua?, Bagaimana *framing* media lokal *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat* dalam pemberitaan mengenai otsus di Papua Barat?, dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya konstruksi dan *framing* dalam sebuah media?

Konstruksi Sosial Masyarakat Papua oleh Media

Media massa dalam hal ini sebagai representasi simbolis dan nilai dalam masyarakat nyatanya telah membentuk stereotip yang sering merugikan pihak tertentu (Badara, 2014). Lebih lanjut, media massa mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat yang kemudian menimbulkan stereotip. Stereotip adalah gambaran umum tentang individu, bersifat *klise*, dan seringkali tidak benar. Media massa sebagai wahana dalam menjalankan komunikasi massa sejak pertama kali keberadaannya telah mampu mengubah berbagai pemikiran, perasaan, dan bahkan mengarahkan pada satu tindakan tertentu (Zakiah, 2017).

Hal yang menarik dari teks di media massa adalah melalui teks media, masyarakat mengetahui realitas. Artinya, teks media bisa

membawa realitas tentang dunia, tetapi bisa juga hanya sebagian dari penggambaran fenomena, karena cara media menghadirkan realitas akan menghasilkan informasi yang dipahami berbeda pula. Realitas media sebagaimana digambarkan oleh Bitzer (2017) adalah sesuatu yang mengaburkan, menipu, dan manipulatif. Pandangan realitas media tersebut setidaknya didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, media tidak hanya sekedar menghadirkan peristiwa, tapi juga membentuk peristiwa. *Kedua*, media lebih tertarik pada peristiwa aneh, konflik, unik, dan yang tidak biasa terjadi di masyarakat. *Ketiga*, adanya kepentingan dalam proses produksi teks media dari kualitas pekerja media, budaya organisasi, ataupun kepentingan ideologis dari pemilik dan kelompok kepentingan yang berafiliasi pada media.

Ketiga alasan tersebut menyebabkan gambaran tentang peristiwa menjadi bias. Di Papua contohnya; konstruksi dalam teks atas peristiwa di media, bukanlah peristiwa yang sebenarnya. Hal inilah yang kemudian dikatakan oleh Walter Lippmann (dalam (Wahid, 2017) sebagai *Distorsi Berita*. Teori tentang surat kabar dan radio ini muncul pada tahun 1920-antetapi masih relevan untuk menjelaskan peran media dalam menghadirkan realitas masyarakat saat ini. Dalam teori *distorsi berita*, media menyajikan konstruksi realitas sosial bukan apa adanya, tapi lewat proses penjagaan agenda (*gate-keeping & agenda-setting*) sebelum disajikan kepada masyarakat. Agenda mediadiwujudkan melalui teks berita yang menghadirkan bayangan realitas yang dibangun media, sehingga berita yang hadir di masyarakat distorsif dan bias.

Terlepas dari berbagai permasalahan mengenai konten dan teks di media massa, baik konvensional maupun media baru, hal itu tidak dapat dipisahkan dari posisi dan fungsi media di tengah masyarakat. Menurut McQuail dalam Subiakto dan Ida (2015) media dianggap sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection*. Media menjadi cermin dari berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, merefleksikan apa adanya. Media sering menampilkan berita “tidak bersalah”–jikaisi media penuh dengan kekerasan, konflik, dan berbagai keburukan lainnya, karena menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Sebagaimana dalam pandangan positivisme, media massa dipahami sebagai alat penyaluran pesan, dari komunikator (wartawan,

jurnalis) ke khalayak (pendengar, pembaca atau pemirsa). Media massa dilihat sebagai alat yang netral, mempunyai tugas utama penyalur pesan, tidak ada maksud lain jika media tersebut menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian sebagai realitas yang sebenarnya serta tidak ditambah dan tidak dikurangi.

Sementara itu, dalam pandangan konstruktivisme, media massa dipahami sebaliknya. Media massa bukan hanya saluran pesan, tetapi ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Dalam tulisan ini, media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Hamad, 2004). *Angle*, arah, dan *framing* dari isi media merupakan cermin realitas, yang diputuskan oleh para profesional media, dengan demikian khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui sesuatu yang mereka inginkan. Hal ini karena media merupakan *filter* atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media memilih isu, informasi, atau bentuk *content* yang lain berdasar standar para pengelolanya. Sehingga, khalayak mendapatkan informasi yang “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian (Subiakto & Ida, 2015).

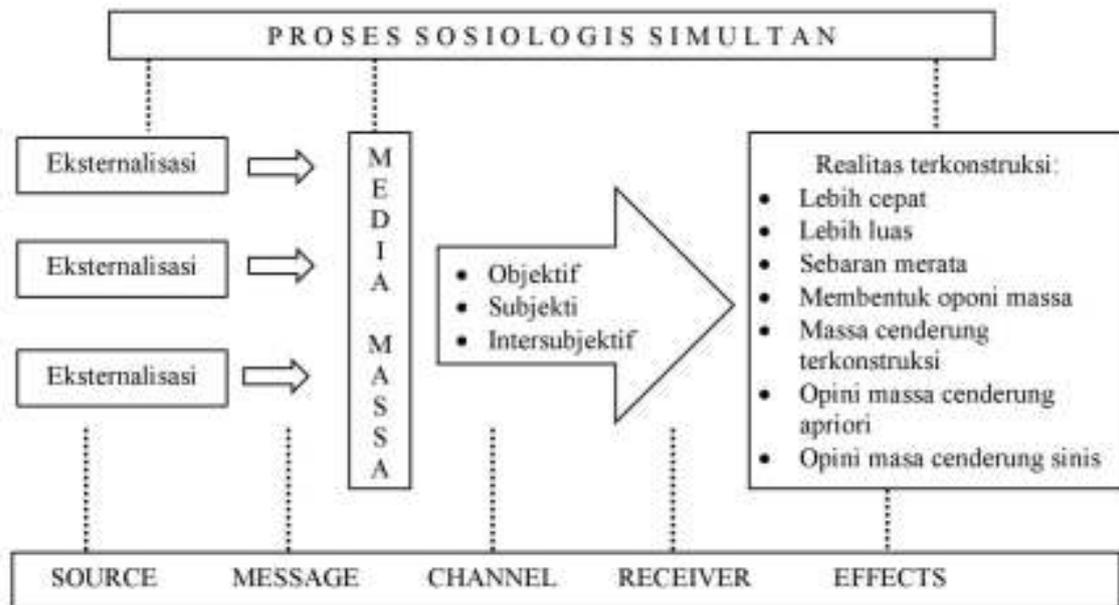
Dalam teori konstruksi realitas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) disebutkan bahwa realitas media dalam teks berita merupakan satu diantara sekian banyak realitas yang dikonstruksi oleh wartawan melalui proses internalisasi dan eksternalisasi. Bahasa adalah unsur utama dalam proses pembentukan realitas, karena melalui bahasa seorang wartawan menarasikan berita baik dalam bentuk tertulis (teks) maupun yang lainnya (Badara, 2014). Dalam media massa, khususnya surat kabar, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah realitas, tetapi dapat menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas, mempengaruhi realitas yang muncul dibenak masyarakat (Badara, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Zakiyah (2017) bahwa citra adalah penggambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi. Citra yang digambarkan media merupakan sikap pada seseorang, sesuatu atau objek tersebut.

Dalam melakukan konstruksi atas realitas, menurut Sujiman (dalam (Badara, 2014) ada tiga tindakan yang dilakukan oleh pekerja

media yang mempengaruhi pembentukan citra. *Pertama* pemilihan simbol (fungsi bahasa) yang dipilih untuk mempengaruhi makna yang muncul. *Kedua*, pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi *framing*) dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitas sedemikian rupa, sehingga dihasilkan sebuah wacana. Pembentukan *frame* didasarkan atas berbagai kepentingan internal maupun eksternal media, baik teknis, ekonomis, politis maupun ideologis. *Ketiga*, kesediaan memberi tempat (agenda *setting*) yaitu menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah pemberitaan. Sehingga fungsi media dalam membentuk makna, melakukan interpretasi melalui media massa terhadap berbagai peristiwa di Papua, dapat mengubah interpretasi masyarakat di luar Papua terhadap realitas dan pola tindakan masyarakat Papua.

Sementara itu, Burhan Bungin dalam bukunya *Konstruksi Sosial Media Massa* memberikan koreksi atas kelemahan atau

kekurangan dari teori Konstruksi Sosial atas Realitas Peter L. Berger, yaitu dengan melihat kondisi perkembangan zaman yang berimbas kepada hubungan-hubungan sosial antara individu dengan kelompoknya (Bungin, 2015). Teori “Konstruksi Sosial Media Massa” oleh Burhan Bungin merevisi pendekatan itu dengan melihat variabel atau fenomena media massa yang substansif dalam proses eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi. Sifat dan kelebihan media massa telah memperbaiki dan melengkapi kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lambat. Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media. Proses konstruksi sosial media massa oleh Burhan Bungin dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 : Proses Konstruksi Sosial Media Massa (Bungin, 2015).

Menurut Burhan Bungin, proses kelahiran konstruksi sosial media massa berlangsung dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut (Bungin, 2015).

(1) Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa. Tugas itu didistribusikan pada *desk*

editor yang ada di setiap media massa. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial. *Pertama*, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Artinya, media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk dijadikan sebagai mesin penciptaan uang atau pelipatgandaan modal. *Kedua*, keberpihakan semu kepada masyarakat. Artinya, bersikap seolah-olah simpati, empati, dan berbagai partisipasi

kepada masyarakat, tetapi ujung-ujungnya adalah “menjual berita” dan menaikkan *rating*. Ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Artinya sebenarnya adalah visi setiap media massa. Akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, tetapi slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

(2) Tahap Sebaran Konstruksi

Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

(3) Pembentukan Konstruksi Realitas

(a) Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, ketika pemberitaan (penceritaan) telah sampai pada pembaca dan pemirsanya (penonton), yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik–Pertama, konstruksi realitas pembenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa; ketiga, sebagai pilihan konsumtif.

(b) Pembentukan Konstruksi Citra

Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model; model *good news*, yaitu konstruksi sebagai pemberitaan yang baik dan model *bad news*, cenderung mengkonstruksi kejelekan atau citra buruk pada objek pemberitaan.

(4) Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa memberi kesempatan kepada pembaca, pemirsa, atau penonton untuk memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu dilakukan sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasan konstruksi sosial. Sementara itu, bagi pembaca atau penonton, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa

ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

Berkaitan dengan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media terhadap teks berita, maka masyarakat sebagai penerima informasi dari media harus bersikap terhadap pemberitaan tersebut. Masyarakat memperoleh dan mencari informasi melalui berbagai media, sebagaimana yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, media menjadi perpanjangan keberadaan manusia (McLuhan, 1964). Lebih dari itu, keberadaan media dipahami sebagai perpanjangan indera manusia–koran atau surat kabar merupakan perpanjangan indera penglihatan, radio sebagai perpanjangan dari indera pendengaran, dan televisi sebagai perpanjangan indera penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut yang kemudian membuat media semakin dekat dengan masyarakat, menjadikan masyarakat tidak dapat terlepas dari keberadaan media dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu tujuan utama media adalah memberikan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Pers No. 40/1999, maupun UU Penyiaran No. 32/2002 dan berbagai regulasi lain yang mengatur cara kerja media serta membawa misi etika komunikasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Sebagaimana dikatakan Abdul Wahid (2017), bahwa sesuai dengan fungsi sosial yang melekat pada media selama ini, maka masyarakat memiliki hak atas informasi yang akurat dari media. Namun dalam implementasinya, media tidak melihat sejauh mana masyarakat hidup dan membutuhkan teks media sebagai sumber informasi yang terpecaya. Media dengan ideologi dan perspektif yang dimilikinya kemudian dapat memiliki perspektif yang berbeda dalam menampilkan realitas. Ada perbedaan antara realitas subjektif dan realitas media. Realitas subjektif adalah realitas hasil persepsi masyarakat sendiri terhadap suatu peristiwa, realitas hasil pengalaman masyarakat berinteraksi dengan fenomena-fenomena. Sementara itu, realitas media adalah realitas yang masyarakat baca (atau dengar dan tonton) di media, yang merupakan realitas hasil konstruksi media yang dibingkai berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisisme (BM, 2012).

Kondisi inilah yang kemudian membuat media memproduksi teks yang bias dan tidak jelas dalam mendefinisikan persoalan sesungguhnya. Sementara masyarakat dipaksa

menerima suguhan media, yang kemudian menjadikan realitas media tersebut sebagai realitas yang sebenarnya. Pada titik inilah masyarakat perlu sadar bahwa teks media tidak selalu menghadirkan informasi yang sesuai dengan realitas yang terjadi sebenarnya, tetapi telah diproduksi dan dikonstruksi yang didasari atas kepentingan ekonomi maupun politik. Kesadaran kritis masyarakat atas teks media dalam hal ini merupakan sebuah keharusan. Terdapat tiga alasan sebagai dasar dari sikap kritis masyarakat terhadap media (Wahid, 2017). *Pertama*, hilangnya hak masyarakat atas informasi yang benar. Jika masyarakat menerima realitas media mentah-mentah atas informasi yang dikemas dalam teks berita tentang Papua, maka masyarakat kehilangan hak untuk mendapat informasi yang benar. Realitas media menjadi realitas yang sesungguhnya.

Kedua, adanya kelompok kepentingan (ekonomi maupun politik) menjadikan teks media sebagai gagasan dominan. *Ketiga*, adanya popularitas konten media yang mengarah pada penyeragaman selera di masyarakat. Keseragaman ini menjadi penghalang dan pengikis keberagaman budaya di masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia. Dalam kasus media di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa budaya Jawadan berita dari Jakarta menjadi tema dominan dalam media massa, karena “pusat Indonesia” berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dalam konteks ini, budaya lainnya direpresentasikan kecil atau bahkan terjadi misrepresentasi dari realitas sesungguhnya. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat selain kritis terhadap teks media, juga memahami hubungan antara budaya, bahasa dan representasi (Wahid, 2017).

Istilah representasi mengacu pada bagaimana seseorang, kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya. Urgensi representasi terlihat dalam dua hal. *Pertama*, apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya. *Kedua*, bagaimana representasi tersebut ditampilkan (Badara, 2014). Ketika membahas representasi, maka tidak dapat dipisahkan dari bahasa dan budaya. Bahasa dalam hal ini yang tertulis dalam bentuk teks berita, yang merepresentasikan sekaligus misrepresentasi sebuah peristiwa. Seseorang atau kelompok yang ditampilkan dengan baik akan ditampilkan dengan pemilihan diksi bahasa yang baik pula. Ada dua cara media memaknai realitas melalui

bahasa. *Pertama*, memilih fakta yang didasarkan pada asumsi wartawan yang tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. *Kedua*, menuliskan fakta, yaitu proses yang berhubungan dengan bagaimana pemilihan fakta yang disajikan kepada masyarakat (Badara, 2014).

Sementara itu, dalam representasi boleh jadi terdapat pula misrepresentasi, yaitu ketidakbenaran penggambaran atau kesalahan penggambaran. Hal tersebut terjadi karena ada ekskomunikasi (*excommunication*) yang merupakan pengeluaran seseorang dari pembicaraan publik. Ini adalah salah satu strategi media dalam menghadirkan atau justru menghilangkan seseorang, suatu kelompok, dan berbagai identitas lainnya. Selanjutnya, eksklusi (*exclusion*) berhubungan dengan pengucilan seseorang, gagasan, dan kelompok dari pembicaraan publik. Hal ini dilakukan dengan pembatasan apa yang bisa dan tidak bisa didiskusikan, siapa yang boleh dan tidak boleh membicarakan hingga pada klasifikasi mana yang baik dan mana yang buruk bagi masyarakat (Badara, 2014).

Framing Media: Sorotan Otsus Antara Ada dan Tiada

Pemberitaan mengenai otonomi khusus di Papua Barat dibingkai dan dicitrakan oleh media secara berbeda, baik itu media nasional maupun media lokal. Imitasi atau reproduksi yang disebutkan Baudrillard dalam karyanya *The precession of Simulacra* dalam Durham dan Kellner (Durham & M., 2006) “*Such would be the successive phases of the image: it is the reflection of the reality; it has no relation to any reality whatsoever; it is its own pure simulacrum*”. Dari situ terlihat beberapa tahapan-tahapan citra dalam teks. *Pertama*, citra merupakan representasi dari realitas. *Kedua*, citra menutupi realitas. *Ketiga*, citra menggantikan realitas yang telah sirna, menjadi simulakrum murni.

Lebih lanjut, lewat berbagai instrumen yang dimilikinya media ikut membentuk realitas yang terkemas dalam pemberitaan. Pemberitaan mengenai Papua misalnya, selalu diberitakan sebagai daerah konflik, kemiskinan, buruknya kesehatan, ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ketertinggalan infrastruktur, dan ketertinggalan dalam bidang lainnya. Hal itu tidak sepenuhnya menunjukkan realitas yang sebenarnya, tetapi juga menggambarkan bagaimana media ikut

berperan dalam mengonstruksi realitas. Media memilih kejadian yang perlu dan tidak perlu ditampilkan sebagai bahan berita.

Media memilih orang atau tokoh sebagai sumber berita berdasarkan kriterianya sendiri sehingga hasil pemberitaannya pun cenderung sepihak. Dengan demikian, media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga mendefinisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat pemberitaan, media dapat membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu. Peristiwa yang telah terbingkai adalah yang didengar dan dibaca khalayak. Khalayak tidak dapat melihatnya dari bingkainya sendiri.

Berita yang dianalisis dalam tulisan ini merupakan berita dari Harian *Radar Sorong* "Jokowi Harus Perhatikan Implementasi Otsus" pada Jumat, 13 April 2018; "Kemiskinan Nyata, Minta Penggunaan Dana Otsus Dievaluasi" pada Minggu, 18 Maret 2018; serta "Implementasi Otsus Masih Menyisakan Banyak Pekerjaan" pada Sabtu, 13 Januari 2018. Sementara itu, berita dari *Antara Papua Barat* yang digunakan adalah "Bupati Inginkan Dana Otsus Untuk Rumah Layak Huni" pada Rabu, 31 Januari 2018. "Teluk Wondama Apresiasi Penerapan Skema Baru ;embagian Dana Otsus Papua Barat" pada Kamis, 14 Desember 2017; serta "Kepala Suku: Dana Otsus Bisa Ciptakan SDM Pariwisata Wondama" pada Rabu, 1 Maret 2017. Berikut ini adalah analisis terhadap berita-berita tersebut.

A. Elemen *Define Problems* (Mendefinisikan Masalah)

- *Radar Sorong*:
 - Presiden harus memperhatikan pemanfaatan dana Otsus (13 April 2018).
 - Implementasi dana Otsus perlu dievaluasi (18 Maret 2018)
 - Penggunaan dana Otsus belum tepat sasaran (13 Januari 2018)
- *Antara Papua Barat*:
 - Salah satu penggunaan dana Otsus untuk membangun rumah (31 Januari 2018)
 - Masyarakat Teluk Wondama apresiasi skema Otsus baru (14 Desember 2017)
 - Pemanfaatan dana Otsus dapat meningkatkan pariwisata (1 Maret 2017)

B. Elemen *Diagnose Cause* (Memperkirakan Masalah atau Penyebab Masalah)

- *Radar Sorong*:
 - Pemanfaatan dana Otsus yang tidak tepat sasaran (13 April 2018).
 - Penggunaan dana Otsus belum merata (18 Maret 2018)
 - Masyarakat belum merasakan secara nyata dampak dari adanya Otsus (13 Januari 2018)
- *Antara Papua Barat*:
 - Kurang pahalannya masyarakat mengenai dana Otsus (31 Januari 2018)
 - Skema lama Otsus kurang efektif (14 Desember 2017)
 - Pemanfaatan Otsus bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur (1 Maret 2017)

C. Elemen *Make Moral Judgement* (Membuat keputusan moral)

- *Radar Sorong*:
 - Presiden harus memperhatikan dan mengkaji kembali penggunaan dana Otsus (13 April 2018).
 - Penggunaan dan penyerapan dana Otsus harus dievaluasi (18 Maret 2018)
 - Pemanfaatan dana Otsus harus dalam bentuk nyata dirasakan oleh masyarakat (13 Januari 2018)
- *Antara Papua Barat*:
 - Pemanfaatan dana Otsus untuk membangun rumah (31 Januari 2018)
 - Pelaksanaan skema baru Otsus Papua Barat (14 Desember 2017)
 - Memaksimalkan penggunaan dana Otsus untuk kemajuan Pariwisata (1 Maret 2017)

D. Elemen *Suggest Remedies* (Menekankan penyelesaian)

- *Radar Sorong*:
 - Pemerintah Pusat (Presiden) dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama menilai kembali penggunaan dana Otsus (13 April 2018).
 - Perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus dalam semua segi (18 Maret 2018)
 - Pemanfaatan dana Otsus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua (13 Januari 2018)

- *Antara Papua Barat:*
 - Membangun rumah layak huni warga lewat dana Otsus (31 Januari 2018)
 - Skema baru 90:10 dapat lebih mengefektifkan penggunaan dana Otsus bagi daerah (14 Desember 2017)
 - Pariwisata adalah salah satu kekuatan Papua yang dapat didanai dari Otsus (1 Maret 2017)

Berita tentang Papua di media merupakan hasil dari konstruksi media yang mempengaruhi pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Papua adalah dari yang mereka lihat dan dengar yang telah dikonstruksi oleh media. Sebagaimana pendapat Niklas Luhmann (dalam (Wahid, 2017) bahwa realitas media sebagai realitas kedua atas kehidupan masyarakat. Dalam beberapa pemberitaan Papua misalnya, bisa jadi yang dipilih atau diekspos hanya mengenai keteringgalan di beberapa pelosok desa, sementara kemajuan, keberhasilan, dan prestasi di daerah lain tidak diekspos. Sehingga, dapat dipahami bahwa lewat teks berita yang disajikan di media, para khalayak (pembaca, pendengar, penonton) digiring untuk memahami realitas yang dibingkai oleh media massa yang kemudian menjadikan realitas media tersebut sebagai realitas sesungguhnya.

Pemahaman masyarakat terhadap realitas tergantung pada realitas pola media. Media ternyata tidak hanya menginformasikan sesuatu tetapi juga memaknakan sesuatu lewat berita-berita dan informasi yang disuguhkan kepada khalayak. Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa masyarakat Indonesia memahami Papua adalah dari apa yang mereka lihat dan dengar di media mengenai pemberitaan di Papua. Konstruksi sosial masyarakat Papua yang dibingkai dalam pemberitaan media membentuk sebuah realitas baru di tengah masyarakat mengenai sebuah permasalahan, dalam tulisan ini membahas mengenai otonomi khusus di Papua Barat. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai otonomi khusus tergantung bagaimana media menghadirkan berita tentang otonomi khusus tersebut.

Dari hasil temuan data, penulis menganalisis setiap berita sesuai elemen *framing* Robert N. Entman dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Framing Radar Sorong OTSUS PERLU DIEVALUASI

Fakta yang ditonjolkan oleh *Radar Sorong* adalah implementasi dana Otsus perlu dievaluasi, karena penggunaan dan penyerapan anggarannya belum efektif serta tepat sasaran. Dana Otsus yang sudah terlaksana 17 tahun di Papua dan Papua Barat masih meninggalkan banyak persoalan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, angka kemiskinan di pulau Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memegang ranking tertinggi di Indonesia, buruknya pelayanan kesehatan, ketertinggalan diberbagai bidang, contohnya pendidikan, ekonomi dan sosial, adalah salah satu bukti belum berhasilnya penggunaan dana Otsus. Pada berita 13 April 2018, bertepatan dengan hadirnya Presiden Joko Widodo ke Sorong, Papua Barat dijadikan sebuah perenungan kembali akan nasib Otsus kedepan. Meskipun kunjungan tersebut tidak berkaitan dengan Otsus, tetapi *Radar Sorong* memilih memberitakan kedatangan Presiden tersebut yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan dana Otsus. Dalam hal ini, *Radar Sorong* memberikan isu atau saran bahwa penggunaan dana otsus perlu dievaluasi oleh Presiden.

Sementara itu, pada pemberitaan mengenai tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah berlimpahnya dana Otsus, *Radar Sorong* melihat belum ada bukti tentang keberhasilan penggunaan dana Otsus, baik dari segi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Meskipun infrastruktur menjadi salah satu segi yang dinilai signifikan perkembangannya, tetapi pembangunan ini belum sampai hingga ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan belum mendapatkan perhatian dari penggunaan dana otsus. Dalam hal ini *Radar Sorong* meringkai bukan saja penggunaan dana otsus yang kurang tepat sasaran, tetapi juga menyorotifakta bahwa Papua dan Papua Barat belum memiliki regulasi yang jelas terkait pemanfaatan dana otsus tersebut. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran, karena tanpa regulasi dan pengaturan yang jelas, penggunaan dana Otsus tidak terarah, tidak jelas pemanfaatannya, serta dalam hal ini masyarakat yang menjadi korban, karena dana otsus tidak menjangkau kebutuhan masyarakat Papua.

Selanjutnya mengenai implementasi dana Otsus yang dinilai kurang tepat sasaran,

Radar Sorong menonjolkan aspek Hak Asasi Manusia. Dalam masalah ini, penggunaan otsus dinilai masih meninggalkan banyak persoalan, salah satu yang terpenting adalah aspek penegakan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Bukan hanya mengenai HAM, penggunaan dana Otsus masih jauh dari upaya menjangkau layanan kebutuhan dasar, seperti transportasi, usaha ekonomi mikro kecil, serta pemberdayaan perempuan Papua. *Radar Sorong* menggambarkan penggunaan dana Otsus di Papua harus segera dievaluasi, ditinjau kembali dalam pemerataannya serta tujuan dan fungsi otsus yang tepat sasaran. Hal ini memberikan informasi kepada Pembaca, bahwa Otsus sudah seharusnya ditinjau dan dievaluasi kembali, sehingga dapat dipahami bahwa saat ini Papua Barat berada pada situasi darurat Otsus. Dari ketiga pemberitaan di *Radar Sorong*, dapat penulis simpulkan bahwa *Radar Sorong* membuka wacana sekaligus memberikan informasi tentang masalah dibalik penggunaan Otsus. Tindakan *Radar Sorong* adalah sebuah awal memecahkan masalah dengan memberikan beberapa gambaran.

Lebih lanjut, *Radar Sorong* banyak menggunakan kalimat langsung dalam penulisan beritanya. Granato menyebutkan bahwa kutipan langsung penting untuk menerangkan kepribadian dari subjek karena kutipan tersebut menunjukkan pilihan kata dan pola dari bacaan (Atmadja, 2014). Sumber yang berbicara memperlihatkan subjek utama secara lebih efektif dibandingkan hanya eksposisi atau deskripsi dari penulis tentang subjek utama. Dengan memasukkan kutipan langsung pernyataan narasumber, maka *Radar Sorong* menunjukkan emosi atau perasaan yang dirasakan kepada pembaca, dalam hal ini menjadi representasi masyarakat Papua mengenai implementasi dana otsus.

Framing Antara Papua Barat Mendukung Penerapan Skema Baru Dana Otsus

Berbanding terbalik dengan *Radar Sorong* yang lebih menonjolkan sisi negatif dari penggunaan dana Otsus, *Antara Papua Barat* sebaliknya melihat dari sisi positif dari penggunaan dana Otsus, terutama penerapan skema baru. Pada pemberitaan 01 Maret 2017, *Antara Papua Barat* menampilkan sosok Kepala suku sebagai pemimpin atau tokoh penting dalam masyarakat Papua yang berpendapat bahwa dana Otsus bisa menciptakan SDM

Pariwisata Wondama. Peluang wisata di teluk Wondama tidak kalah dengan daerah lainnya, hanya saja belum dikelola dan dimaksimalkan dengan baik. Dalam hal ini *Antara Papua Barat* berusaha memberi informasi serta meyakinkan pembaca bahwa salah satu pemanfaatan dana otsus bisa melalui pariwisata. Pengembangan pariwisata bukan hanya masalah objek alam atau tempat wisatanya saja, tetapi membutuhkan pula pelatihan SDM, terutama bagi generasi muda untuk mempersiapkan teluk Wondama menjadi salah satu tujuan wisata juga perlu diperhatikan yang pembiayaannya melalui dana otsus.

Antara Papua Barat berusaha membingkai berita otsus ini dengan sisi yang berbeda, mencoba melihat potensi yang bisa dikembangkan melalui dana otsus, melalui pemberitaan pada Kamis, 14 Desember 2017 tentang apresiasi masyarakat Wondama dalam penerapan skema baru dana otsus. *Antara Papua Barat* menginformasikan kepada pembaca bahwa ada harapan yang lebih baik dari penggunaan dana otsus, karena selama ini pembahasan adalah mengenai kegagalannya saja. Skema baru yang diterapkan dalam penggunaan dana otsus mulai 2018 adalah 90:10, 90% dana otsus akan mengalir ke daerah, sementara provinsi hanya mengelola 10% dari total dana otsus. Perubahan skema tersebut diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan dana otsus di daerah.

Sementara itu, pada Rabu, 31 Januari 2018, *Antara Papua Barat* menonjolkan bentuk konkrit dari penggunaan dana otsus, salah satunya adalah membangun rumah layak huni bagi masyarakat. Pembangunan rumah untuk warga ini adalah salah satu bentuk nyata dari implementasi dana otsus, sehingga warga dapat merasakan langsung pemanfaatan dana otsus tersebut. Tahun 2018 akan dibangun 400 unit rumah di teluk Wondama, selain juga fasilitas umum lainnya, yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perkenomian. Dari ketiga pemberitaan di *Antara Papua Barat*, dapat disimpulkan bahwa *Antara* membingkai otsus ini dari sisi keberhasilan serta rencana strategis ke depan. Masih ada harapan yang lebih baik dari penggunaan dana otsus di kemudian hari dengan manajemen dan aturan yang mempunyai serta ditopang dengan kualitas SDM.

Reese menyebutkan peningkatan terhadap sebuah topik, baik individual, kelompok, dan organisasi dapat menentukan

peran sebagai protagonis, antagonis, atau penonton. Ketika sebuah ide, topik, aksi, atau kejadian yang tidak terlalu dikenal publik telah dibingkai, maka interpretasinya dipengaruhi oleh *frame* tersebut (Atmadja, 2014). Berdasarkan teori tersebut, *Antara Papua Barat* mengkonstruksi pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai aktor protagonis dalam implementasi penggunaan dana otsus yang berusaha memaksimalkan berbagai potensi guna pemanfaatan dana otsus yang tepat sasaran.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Isi Berita di Media

Menurut hasil penulisan oleh Mursito, dalam *Realitas Media* (BM, 2012) menemukan hasil bahwa media memilih orang atau tokoh sebagai sumber berita berdasarkan kriterianya sendiri sehingga hasil pemberitaannya pun cenderung sepihak. Dengan demikian, media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga mendefinisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat pemberitaan, media membingkai peristiwa sehingga peristiwa yang telah terbingkai itulah yang didengar dan dibaca masyarakat. Artinya masyarakat membaca peristiwa atau berita yang telah dikonstruksi oleh media. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak mempersepsi peristiwa melainkan mempersepsi berita tentang peristiwa, sehingga mereka tidak dapat memisahkan dari bingkainya sendiri. Masyarakat “membaca peristiwa” yang fakta-faktanya telah diseleksi, diformat, diberi struktur, dan menuruti perspektif media—cerita tentang suatu peristiwa bergantung pada bagaimana media mengkonstruksinya (BM, 2012).

Ada beberapa hal yang mempengaruhi konstruksi sosial media juga *framing* yang dilakukan oleh media terhadap sebuah pemberitaan, diantaranya sebagai berikut.

Kepentingan *Media Economics*

Konstruksi sosial media ternyata tidak lepas dari eksistensi media, jika dilihat dari pendekatan *media economics* (Subiakto & Ida, 2015). Dalam pandangan ini, media merupakan hasil persilangan dari kehendak pasar, produk, dan teknologi. Keberadaannya memerlukan biaya tetap yang tinggi, menyebabkan kekuatan modal dan kedekatan pemasang iklan telah menarik ke pusat ekonomi, yaitu Jakarta. Persaingan antarmedia, membuat media

berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memandang sisi idealisme. Selera masyarakat ditentukan oleh media, bukan media ditentukan oleh masyarakat.

Hal itu sejalan dengan pendapat Tony Thwaites, dkk (2009) yang melihat institusi media bukan tentang penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi menyangkut keberlanjutan hidup dan keberuntungan di dunia perdagangan. Oleh karena itu, institusi media dalam membuat berita merepresentasikan kepentingan seluruh publik (yaitu pemodal dan masyarakat), meskipun pada akhirnya terdapat keberpihakan. Kepentingan media dibuat tampak sejalan dengan kepentingan publik, makna dan realitas media ditawarkan kepada masyarakat atau publik sebagai sesuatu yang telah disetujui dan merupakan refleksi dari hasrat dan keinginan masyarakat, meskipun pada kenyataannya isi media merupakan kepentingan kelompok semata. Inilah yang disebut sebagai hegemoni media. Media membuat masyarakat menyetujui dan menganggap penyajian teks media merupakan sebuah kebenaran yang mutlak, salah satu contohnya berita tentang Papua.

Membahas mengenai *media economic*, bisnis media merupakan bisnis yang berbeda dari bisnis kebanyakan. Hal ini disebabkan bisnis media melibatkan segitiga yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sisi pertama adalah pembaca, pemirsa, atau pendengar, sisi kedua adalah pemasang iklan, dan sisi ketiga adalah warga (Wahid, 2017). Berbeda dengan bisnis pada umumnya, dalam bisnis media, pembaca, pemirsa, atau pendengar bukanlah pelanggan (*customer*). Mereka hanya ditempatkan sebagai pihak yang bekerja pada media untuk menghasilkan *rating*. Kemudian, hasil *rating* tersebut dijual oleh media kepada pemasang iklan—semakin banyak *rating*, *klik*, dan *oplakan* meningkatkan biaya pemasangan iklan.

Ini merupakan sebuah alasan logis, mengapa informasi pada media—baik itu televisi, radio, internet—diberikan kepada pembaca, pemirsa, dan pendengar secara gratis. Bahkan pada media cetak, pembaca hanya membutuhkan biaya sedikit untuk mengganti ongkos produksi. Hal ini disebabkan biaya produksi sebagian besar dibebankan kepada para pemasang iklan, bukan pembaca. Sehingga, manajemen media berusaha untuk membuat konten semenarik mungkin, bukan demi kepentingan pembaca, pemirsa, atau pendengar, melainkan untuk meningkatkan

rating, agar dapat dijual kepada pemasang iklan. Tak heran banyak isi atau konten media yang tidak berkualitas tetapi tetap disuguhkan. Hal itu karena *rating*-nya tinggi.

Hegemoni Media dan Rezim Representasi

Bersama hegemoni media, penciptaan makna dibangun melalui media massa; lewat televisi, radio, koran, majalah, maupun media sosial seperti portal berita dan berbagai situs penyedia informasi lainnya. Makna bersama yang diturunkan dari teks media dapat mengatur dan mengendalikan isu atau nilai yang berkembang di masyarakat. Makna juga mendorong masyarakat untuk mendekatkan pada preferensi identitas tertentu, yang membedakan 'kita dan mereka'. Inilah yang disebut Stuart Hall (2003) sebagai *the cultural circuit*, pembentukan makna dalam praktik sebuah kebudayaan di masyarakat yang mencakup produksi, konsumsi, regulasi, representasi, dan identitas.

Representasi berasal dari bahasa Inggris, *representation* yang berarti perwakilan, gambaran, atau penggambaran. Secara sederhana, representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang terdapat dalam kehidupan yang digambarkan melalui suatu media. Representasi menurut Chris Barker (2004) adalah konstruksi sosial yang perlu memahami makna tekstual dari beragam konteks. Representasi merupakan aktivitas membentuk ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh semua manusia, seperti penggunaan tanda (gambar, bunyi, dan lain-lain) untuk menghubungkan, menggambarkan, memotret, atau mereproduksi sesuatu yang dilihat, diindera, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu (Danesi, 2011).

Pada tahun 2010, Eugenia Siapera dalam bukunya yang berjudul *Cultural Diversity and Global Media The Mediation of Difference* (Siapera, 2010) mengemukakan konsep baru yang bernama rezim representasi. Istilah rezim representasi sendiri secara longgar didasarkan pada konsep Michel Foucault tentang "*regime of truth*" atau rezim kebenaran, yang menunjukkan konvergensi ide-ide dan wacana dengan struktur kekuasaan dan mekanisme yang mempertahankan sesuatu sebagai sebuah "kebenaran". Dalam melakukan upaya penentuan dan pembentukan sebuah kebenaran, rezim tersebut mengecualikan, memodifikasi, membatasi, meminggirkan, dan

mengendalikan gagasan dan wacana lain yang berada di luar kebenaran. Berangkat dari hal tersebut, Siapera kemudian membangun konsep rezim representasi dengan mempertahankan implikasi politik dan isu-isu yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan di masyarakat, klaim terhadap kebenaran dan akurasi, dan pengecualian yang dikenakan oleh rezim perwakilan tertentu yang digagas oleh konsep rezim kebenaran. Dengan demikian, gagasan rezim representasi mencoba menyoroiti karakter hegemonik representasi, atau dalam kata lain, tidak ada rezim representasional tunggal yang mampu mengendalikan sepenuhnya representasi dalam satu bidang.

Siapera (2010) kemudian mengemukakan gagasan bahwa rezim representasional sebagai operasi dalam hierarki representasional, ketika rezim tertentu mendominasi lainnya, meskipun masih memungkinkan beberapa ruang untuk rezim lain untuk bersaing. Dalam membedakan antara rezim yang berbeda, gagasan rezim representasi menitikberatkan pada pertimbangan keteraturan dan sistematis yang terkait dengan rezim yang bekerja dalam satu representasi. Hal tersebut menunjuk pada stabilitas atau inti tertentu dalam setiap rezim. Ada tema dan gambar yang berulang yang menunjukkan bahwa representasi tertentu milik rezim tertentu.

Dalam tulisan yang sama, Siapera (2010) kemudian mengklasifikasikan rezim representasi menjadi lima jenis yakni *Racist regime*, *Domesticated difference regime*, *The regime of commodification of difference*, *Essentialized difference regime*, dan *Alternative regime*. Pembagian klasifikasi rezim representasi tersebut didasarkan pada tiga kriteria. *Pertama*, rezim representasi membentuk seperangkat kata dan gambar, ide dan pandangan, argumen dan pendapat yang secara sistematis membangun perbedaan dalam cara-cara tertentu sehingga sesuai dengan kepentingan pemilik rezim. *Kedua*, cara sarana rezim-rezim ini beroperasi yang dapat mengidentifikasi tema utama dari satu rezim representasi. *Ketiga*, melihat tujuan utama atau yang ingin dicapai oleh masing-masing rezim.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa representasi merupakan konstruksi realitas melalui perpaduan simbol yang dapat dipahami secara bersama. Representasi bukan hanya gambaran dunia apa adanya, tetapi selalu terkait dengan konteks dan tujuan. Melalui

media massa, gagasan sampai kepada masyarakat yang diarahkan pada pandangan tertentu sesuai dengan maksud dari pembuat teks. Representasi dihadirkan dari pandangan kelas yang dominan. Hal ini disebabkan budaya massa menuntut adanya keseragaman, standar, dan lebih mudah dipahami bersama. Perbedaan dalam media massa dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan; sebagai sasaran komodifikasi media. Akhirnya, representasi simbol-simbol dominan ini melahirkan penindasan terhadap kelompok minoritas (Wahid, 2017).

Jika dikaitkan dengan berita mengenai Papua dari jumlah persentase 1,1%, tentu berita mengenai Papua menjadi “berbeda” dibandingkan berita lainnya, terutama dominasi berita dari Jakarta. Hal itu membuat berita-berita Papua menjadi menarik serta menjadi komoditas berita dengan nilai jual lebih. Akhirnya, masyarakat—terutama bagi mereka yang tidak dapat melihat secara nyata realitas sesungguhnya keadaan di Papua—memahami Papua melalui realitas media dalam teks berita. Keterbatasan ruang, waktu, dan sumberdaya di media tidak memungkinkan realitas di masyarakat Papua diambil secara penuh dan disajikan apa adanya. Teks media dengan demikian merupakan hasil penyederhanaan dari kompleksitas realitas di masyarakat Papua, memberikan pilihan representasi Papua dalam sebuah teks media.

Selanjutnya mengenai *framing* yang dilakukan oleh *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat*, dapat dipahami adanya hegemoni media dan rezim representasi. Sebut saja rezim *domesticated difference regime* (Siapera, 2010). Dalam rezim ini perbedaan dipahami secara dangkal kemudian dibangun sebagai sesuatu yang dianggap aman dan tidak mengancam. Atau dalam kata lain perbedaan dalam rezim representasi ini diremehkan, dianggap tidak penting, atau dikubur didalam karpet. *Antara Papua Barat* berusaha melakukan ini dalam *framing* beritanya mengenai otonomi khusus di Papua Barat. Mereka berusaha meredam permasalahan otonomi khusus, menggantikannya dengan berbagai prestasi yang mungkin sangat kecil porsinya, sehingga permasalahan otonomi khusus dianggap bukan suatu masalah besar dan bukan persolan yang membahayakan.

Sementara itu, *Radar Sorong* memilih untuk menggunakan *alternative regime* yang mencoba menghindari pemahaman tunggal tentang perbedaan budaya. Perbedaan identitas

tetap menjadi pertanyaan terbuka. Rezim representasi ini menciptakan ambiguitas dan ambivalensi *vis-a-vis* identitas dan perbedaan; menggunakan kreativitas dalam pertemuannya dengan perbedaan dan identitas; serta memobilisasi keragaman perspektif. Rezim representasi ini berkontribusi untuk refleksi terus menerus tentang identitas dan perbedaan; mempertanyakan moralitas sederhana dari kebaikan-buruk yang ditemukan di rezim lain; serta menciptakan kemungkinan politik baru (Siapera, 2010). *Radar Sorong* melihat bahwa persoalan otonomi khusus perlu untuk didiskusikan kembali, jangan ada pemahaman tunggal mengenai permasalahan ini. Perlu adanya pertanyaan terbuka, salah satunya dari media maupun masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang dialami dalam implementasi dana otonomi khusus. Dalam hal ini, pemerintah, media, dan juga masyarakat menjadi pengawal otonomi khusus di Papua Barat.

Pengaruh Strukturasi dalam *Framing* Media

Meskipun *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat* adalah dua media lokal di Papua Barat, tetapi kedua media ini membingkai penggunaan dana otsus dalam bingkai yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa *framing* media sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya tidak terlepas dari pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media. Jika mengaitkan dengan teori strukturasi media, Vincent Mosco (2009) melihat bahwa baik struktur maupun agen memiliki peran yang sama penting dalam menentukan sistem komunikasi. Mosco melihat strukturasi sebagai proses tempat struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial dan masing-masing struktur melayani satu sama lain. Dalam pemahaman yang coba dikembangkan oleh Vincent Mosco, ekonomi politik media secara sederhana dapat dipahami bahwa media adalah institusi politik dan institusi ekonomi yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khayalak umum. Dalam perspektif strukturasi yang memiliki tendensi tentang perubahan sosial, sesuatu yang menggambarkan struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui struktur-struktur sebagai medium.

Strukturasi adalah proses menciptakan hubungan sosial, terutama yang diselenggarakan di sekitar kelas sosial, gender, dan ras. Ekonomi politik komunikasi mencakup literatur tentang kelas sosial, terutama dari perspektif kategoris,

mengeksplorasi pentingnya kekuatan kelas. Dalam bukunya, Mosco (2009) juga menjelaskan beberapa jenis penulisan yang menandai penulisan kontemporer di kelas sosial yang mengikuti tradisi yang panjang dengan meneliti peran media, termasuk berita dan hiburan dalam pembangunan kelas sosial (Mosco, 2009). Beberapa dari representasi ini memperkuat stereotip kelas sosial tetapi dengan cara yang berbeda.

Bila dikaitkan kembali dengan *framing* media *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat*, dapat penulis pahami bahwa adanya strukturasi media mempengaruhi *framing* yang dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mosco (2009) bahwa adanya agen-agen sebagai elit dalam sebuah media menjadi penentu sebuah *framing* media. Agen-agen yang dimaksud adalah pemilik media, redaktur, dan editor. Selain itu, ada juga agen lain di luar insitusi media yang juga berpengaruh, yaitu pemerintah dan pemasang iklan. Selain mengaitkan hal ini dengan teori dari Mosco, penulis juga dapat menganalisis serta mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan observasi dan pengalaman yang dialami oleh penulis.

Berdasarkan pengalaman meliput dan hasil observasi pada media lokal di Papua Barat, melalui liputan Ekonomi dan Pembangunan, dalam berita *feature* mengenai peran mama-mama Papua (sebutan untuk ibu-ibu asli Papua) dalam menopang perekonomian keluarga, penulis menemukan satu hal yang menarik. Ketika itu, masyarakat umum, pemerhati, hingga anggota dewan menyayangkan kondisi tempat berjualan mama-mama yang tidak layak, yaitu di pinggir jalan dan sangat tidak layak untuk berjualan, berbeda jauh dengan kondisi di dalam pasar yang mayoritas diisi oleh pedagang dari suku pendatang. Awalnya penulis juga memiliki pemahaman dan pendapat yang sama. Namun, ketika penulis ditugaskan untuk menulis berita tersebut, melalui observasi dan wawancara dengan pedagang, baik mama-mama Papua maupun para pendatang, penulis menemukan suatu kenyataan yang lain.

Hasil wawancara yang dilakukan menghasilkan hal diluar dugaan. Ternyata pemahaman mengenai tidak layaknya tempat berjualan mama-mama adalah tidak tepat. Lapak-lapak para penjual pendatang di dalam pasar merupakan lapak milik mama-mama yang secara sengaja disewakan kepada mereka, dan

mereka (pendatang) harus membayar sewa per bulannya kepada mama-mama Papua yang kemudian memilih berjualan di pinggir jalan. Kemudian, setelah penulis mewawancarai beberapa mama Papua, mereka ternyata lebih nyaman berjualan di pinggir jalan, karena lebih dilihat pembeli daripada di dalam pasar, selain itu, dengan menyewakan lapak di dalam pasar kepada pendatang dapat menghasilkan penghasilan tambahan untuk mama-mama Papua tersebut.

Fakta ini ingin penulis angkat dalam berita yang ditugaskan kepada penulis. Namun, ketika sampai di meja editor, diputuskan bahwa berita tersebut tidak dapat terbit. Alasannya cukup mencengangkan. Dikatakan oleh editor bahwa apa yang ditulis sangat bagus, tetapi tidak dapat terbit karena konten beritanya yang "membahayakan". Berdasarkan pengalaman tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman editor tentang "membahayakan" adalah karena dapat menyinggung atau mematahkan argumentasi berbagai pihak yang secara sengaja mengkonstruksi kondisi tempat jualan mama-mama Papua sebagai sesuatu sebagai berita yang memiliki nilai jual tersendiri.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa strukturasi media mempengaruhi *framing* media, dalam kasus *Radar Sorong* secara tidak langsung melakukan "perlawanan" kepada pemerintah soal dana otsus. Namun, apa yang dilakukan oleh *Radar Sorong* belum sampai pada tahap kritis. *Radar Sorong* baru sampai pada tahap memberi informasi kepada masyarakat bahwa ada permasalahan dalam pemanfaatan dana Otsus, kemudian memberikan saran kepada beberapa pihak, salah satunya Presiden untuk mengevaluasi dan meninjau kembali pemanfaatan serta implemtasi penggunaan dana otsus. *Framing* ini memiliki argumentasi. Meskipun secara strukturasi *Radar Sorong* di bawah naungan Jawa Pos, tetapi *Radar Sorong* berada dalam kawasan Sorong, Papua Barat yang secara struktural di bawah naungan pemerintah daerah. Pemberitaan yang dilakukan oleh *Radar Sorong* mengedepankan *framing* yang kritis dengan didukung data-data yang signifikan.

Berbeda dengan *framing* yang dilakukan oleh *Antara Papua Barat* yang secara strukturasi berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di daerah. Keberadaan *Antara Papua Barat* belum lama di tanah Cendrawasih yang berkantor di Manokwari ini, tentu perlu apresiasi lebih dari pemerintah daerah salah satunya

dilakukan dengan cara mendukung program pemerintah. *Antara Papua Barat* berusaha untuk “pro” dengan melakukan *framing* dalam berita otsus mengenai keberhasilan dan harapan otsus kedepan. Dengan menonjolkan dampak positif otsus, *Antara Papua Barat* berusaha mengaburkan dampak negatif penggunaan otsus, kekurangan serta kegagalan pemanfaatannya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keberadaan *Antara Papua Barat* di tanah Papua melalui pemerintah daerah.

Penutup

Konstruksi realitas sosial masyarakat Papua dalam media membuat masyarakat memahami Papua dari apa yang disuguhkan oleh media. Media mengkonstruksi pemberitaan—salahsatunya mengenai otonomi khusus, selain tergantung pada idealisme dalam sebuah instansi media, juga dipengaruhi oleh kemampuan wartawan dalam melakukan internalisasi dan eksternalisasi berita. Berkaitan dengan hal tersebut, kita harus mampu menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih dan memilah informasi melalui media, agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan akurat dapat terwujud.

Radar Sorong berusaha mbingkai berita mengenai Otsus Papua Barat dari sudut pandang pemanfaatan dan penyerapan yang belum maksimal. *Radar Sorong* mencoba memberi saran kepada Pemerintah sekaligus memberi informasi kepada masyarakat bahwa ada “masalah” dengan implementasi dana otsus selama ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi dana otsus agar pemanfaatan otsus kedepan dapat sesuai dengan yang diharapkan serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. *Framing* yang dilakukan *Radar Sorong* belum sepenuhnya mengkritisi Pemerintah, tetapi telah berupaya menyadarkan Pemerintah dan masyarakat lewat berita yang diterbitkannya.

Berbeda dengan *Antara Papua Barat* yang melihat dari sudut pandang keberhasilan dana otsus. Masih ada cara untuk menggunakan dana otsus agar tepat sasaran, salah satunya dengan membangun rumah untuk masyarakat. *Antara Papua Barat* berusaha melihat adanya sisi positif dari dana otsus, yang salah satunya ditonjolkan dengan berita tentang apresiasi masyarakat teluk Wondama terhadap dana otsus. Hal ini dapat dipahami bahwa *Antara Papua Barat* berusaha untuk meredam berbagai

pertanyaan seputar Otsus dan semua keagalannya, dengan menonjolkan bahwa dana otsus tidak semuanya gagal ataupun tidak tepat sasaran; ada juga yang berhasil bahkan diapresiasi masyarakat.

Framing kedua media lokal ini nyatanya tidak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik media. Dalam hal ekonomi, berita yang ditampilkan mengenai dana otsus secara tidak langsung mengundang minat para pembaca, berita yang “laris” di pasaran. Sementara itu, dari sisi politik, kedua media ini juga perlu mempertimbangkan serta mengikuti sistem politik media yang ada di Papua Barat, sehingga, penting bagi media untuk mengakomodasi Pemerintah Daerah meskipun secara strukturasi kepemilikan kedua media ini terpusat. Pengaruh strukturasi dalam institusi media, melalui agen-agen yang secara struktural lebih tinggi, juga dapat mempengaruhi *framing* sebuah media.

Daftar Pustaka

- Andrianto, T.T. (2001). *Mengapa Papua Bergejolak?* Yogyakarta: Gama Global Media.
- Atmadja, X.L. (2014). Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Di Media Online. *Jurnal E-Komunikasi*.
- Badara, A. (2014). *Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Barker, C. (2004). *The Sage Dictionary of Cultural Studies*. Australia: Sage.
- Berger, P.L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. USA: Pinguin Books.
- Bitzer, L. (2017). Philosophy and Retic. Dalam A. Wahid, *Masyarakat dan Teks Media* (hlm. 139). Malang: UBPress.
- BM, M. (2012). *Realitas Media*. Semarang: Spikom.
- Bungin, B. (2015). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Danesi, M. (2011). *Pesan, Tanda, dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Durham, M.G., & M., K.D. (2006). *Media and Cultural Studies*. Australia: Blackwell.

- Eriyanto. (2004). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Hall, S. (2003). *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Malak, S. (2012). *Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Ar Rafi.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extension of Man*. London: The MIT Press.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. London: SAGE Publication.
- Papua, P. (2006). *Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus Bergejolak?* Jakarta: Sentralisme Production.
- Rochendi, & Saleh, K.A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 103 - 119.
- Siapera, E. (2010). *Cultural Diversity and Global Media The Mediation of Difference*. USA: Wiley Blackwell.
- Sitompul, A.V. (2017). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat). *Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret*.
- Statistik, B.P. (2018). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Subiakto, H., & Ida, R. (2015). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Suryawan, I.N. (2011). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 140 - 143.
- Thwaites, T., Davis, L., & Mules, W. (2009). *Introducing Cultural And Media Studies: Sebuah Penekatan Semiotik*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wahid, A. (2017). *Masyarakat dan Teks Media*. Malang: UBPress.
- Zakiah, K. (2017). Citra Bangsa Dalam Bingkai Media. *Komunikasi UNSEOD*.

